



# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEKOLAH GRATIS DI INDONESIA: STUDI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Edi Rahman<sup>\*a1</sup>, Rahmat Salam<sup>b2</sup>, Mukhlishin<sup>c3</sup>

<sup>1,2</sup>Progam Studi Magister Ilmu Administrasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram.

<sup>1</sup>[rahmanedi61@gmail.com](mailto:rahmanedi61@gmail.com); <sup>2</sup>[rahmat.salam@umj.ac.id](mailto:rahmat.salam@umj.ac.id); <sup>3</sup>[mukhlishin@ummat.ac.id](mailto:mukhlishin@ummat.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 08-06-2024

Disetujui: 15-07-2024

Dipublikasikan: 25-09-2024

### Kata Kunci:

- Kebijakan Sekolah Gratis
- SMK Negeri
- Kutai Kartanegara

### Keywords:

- Policy Free School
- SMK Negeri
- Kutai Kartanegara

## Abstrak

**Abstark-** Penelitian ini berangkat dari permasalahan implementasi kebijakan sekolah gratis di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan meringankan beban ekonomi keluarga berpenghasilan rendah, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan sekolah gratis, dengan fokus pada evaluasi implementasi kebijakan sekolah gratis di Kutai Kartanegara, dampak terhadap kualitas pendidikan, motivasi dan prestasi siswa, serta persepsi pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan populasi yang terdiri dari SMKN di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sampel diambil dari dua SMKN di bagian tengah, hulu, dan hilir. Metode analisis deskriptif dan konten analisis data dari hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kebijakan ini telah berhasil dalam beberapa aspek, seperti peningkatan akses pendidikan, namun terdapat kendala serius yang menghalangi pencapaian hasil yang optimal. Hambatan ini termasuk masalah fasilitas yang belum memadai, keterbatasan sumber daya, serta pengelolaan dana yang kurang efektif. Temuan ini memperkaya literatur yang ada dengan menunjukkan bahwa perhatian yang lebih besar terhadap aspek teknis dan manajerial sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dari kebijakan sekolah gratis. 2) Adanya penurunan motivasi belajar pada sebagian siswa dari keluarga mampu, yang tampaknya disebabkan oleh persepsi bahwa pendidikan menjadi kurang bernilai ketika tidak ada biaya yang dikenakan. Hal ini menekankan perlunya penyesuaian dalam kebijakan untuk memastikan bahwa program sekolah gratis memberikan manfaat yang seimbang bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

**Abstract-** This research is based on the implementation of the free school policy in State Vocational High Schools (SMK) in Kutai Kartanegara Regency. Although this policy aims to improve access to education and ease the economic burden of low-income families, its implementation faces a number of significant obstacles. The main objective of this study is to analyze the free school policy implementation process deeply, focussing on the evaluation of free school policy implementation in Kutai Kartanegara, the impact on education quality, student motivation and achievement, and stakeholders' perceptions. This study used qualitative methods with a population consisting of SMKN in Kutai Kartanegara Regency, and samples were taken from two SMKN in the middle, upstream, and downstream sections. Descriptive and content analysis methods analyzed data from interviews and observations. The results show that: 1) The policy has been successful in some aspects, such as improving access to education, but there are serious obstacles that hinder the achievement of optimal results. These include inadequate facilities, limited resources, and ineffective fund management. The findings enrich the existing literature by showing that greater attention to technical and managerial aspects is needed to achieve the long-term success of the free school policy. 2) There is a decrease in learning motivation among some students from well-off families, which seems to be due to the perception that education becomes less valuable when no fees are charged. This highlights the need for adjustments in the policy to ensure that the free school program provides balanced benefits to all students, regardless of their economic background.

## PENDAHULUAN

Tujuan akhir dari sistem pendidikan ini adalah untuk membina siswa menjadi individu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan pada akhirnya menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi, membimbing, mendukung, dan memantau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional (Sabani & Lutfia, 2023).

Promosi dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Implementasi dari gagasan-gagasan ini di lapangan sangatlah penting, karena peraturan tanpa tindakan yang sesuai tidak akan memiliki arti yang signifikan. Gagasan ini sejalan dengan pernyataan Herbert Spencer bahwa tujuan utama pendidikan tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga melakukan tindakan. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pendidikan harus mencakup pengetahuan dan aplikasi praktis. Dampak dari kegiatan lapangan terhadap kualitas hasil tidak hanya ditentukan oleh program itu sendiri, tetapi juga oleh tindakan yang diambil di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan reaksi dan dukungan yang baik dari berbagai pemangku kepentingan melalui upaya dan prosedur kolaboratif untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, terutama di bawah kebijakan yang memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia yang luar biasa. Untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi, penting bagi pemerintah untuk memikul tanggung jawab dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pendidikan termasuk pembebasan biaya sekolah (gratis) (Sukma & Jayadi, 2023).

Implementasi kebijakan sekolah gratis, yang didanai oleh program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), berfungsi sebagai pelengkap inisiatif wajib belajar yang diperkenalkan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Keberlanjutan kebijakan ini setelah munculnya isu wajib belajar yang mengalami kemunduran karena kendala keuangan orang tua, terus menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai implementasi penuh program Wajib Belajar 9 Tahun. Selain tingkat atrisi yang tinggi di setiap jenjang pendidikan, masalah rendahnya angka partisipasi juga menjadi tantangan berat yang belum ada solusinya. Rata-rata lama sekolah yang saat ini berada di angka 7,2 mengindikasikan bahwa masih ada jarak yang cukup jauh untuk mencapai target 9,0.

Hambatan terhadap akses anak terhadap pendidikan sering kali berasal dari terbatasnya pemahaman masyarakat tentang perlunya menyekolahkan anak mereka, serta beban keuangan yang terkait dengan pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, Kebijakan Sekolah Gratis diimplementasikan oleh pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kebijakan ini mencakup komitmen politik dan komitmen manajerial. Dari perspektif politik, konsep pendidikan gratis

menyiratkan bahwa orang tua dibebaskan dari biaya pendidikan. Hal ini berlaku bagi orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri maupun swasta tanpa pengecualian. Namun, ketika mempertimbangkan perspektif manajemen, penting untuk dicatat bahwa istilah gratis tidak menyiratkan kebebasan mutlak.

Kebijakan Sekolah Gratis adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mempengaruhi perspektif para pemangku kepentingan utama di bidang pendidikan dasar dan menengah pertama. Para pemangku kepentingan ini termasuk orang tua yang memiliki anak yang terdaftar di sekolah negeri dan swasta, serta pengelola sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri dan swasta. Program ini memiliki dampak langsung pada kedua pihak yang terlibat. Penerima manfaat dari program ini adalah orang tua yang memiliki anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama negeri. Inisiatif ini meringankan beban keuangan yang terkait dengan penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak mereka di tingkat ini. Orang tua yang anaknya terdaftar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta tidak mendapatkan manfaat langsung dari program ini. Namun, perlu dicatat bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional menggarisbawahi kemungkinan untuk membebaskan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dari biaya operasional. Sebaliknya, biasanya diantisipasi bahwa siswa yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta tidak akan dikenakan biaya yang berlebihan. Namun demikian, pemerintah daerah juga memberikan pengecualian bagi orang tua yang anaknya bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama swasta, sehingga meringankan beban biaya operasional. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang berasal dari pemerintah pusat, terutama berfungsi sebagai alokasi dana awal untuk pemerintah daerah dalam rangka memberikan dukungan keuangan untuk penyediaan pendidikan dasar gratis.

Pendekatan model CIPPO (*context, input, process, product, and outcomes*) terhadap proses penerapan pendidikan gratis menjadikan lulusan sekolah SMKN dipandang unggul dalam kedisiplin, keuletan, kemampuan teori, kemampuan praktek, rasa percaya diri, ketelitian, kreativitas, dan kepemimpinan; serta kecepatan mendapat pekerjaan, jumlah lulusan yang bekerja, dan penghasilan lulusan yang memadai (Soenarto et al., 2017).

Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran. Walaupun dari segi jumlah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya pendidikan gratis. Adapun faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan program pendidikan gratis pada pendidikan dasar dan menengah, kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disebabkan oleh singkatnya waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban (Abubakar, 2017).

Sejalan dengan hasil penelitian Dyah Puspitoningrum, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan gratis sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Warga sekolah khususnya siswa dan orang tua

siswa telah dapat menikmati manfaat dari kebijakan pendidikan gratis karena sangat membantu meringankan beban orang tua siswa dalam membiayai pendidikan anaknya. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan dan diatasi agar implementasi kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan dengan optimal (Puspitoningrum, 2009).

Selain itu, implementasi kebijakan sekolah gratis belum dapat diharapkan untuk meningkatkan kualitas sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Walaupun dalam implementasi terdapat capaian yang kurang memuaskan setidaknya terdapat 20% hingga 35% anggaran biaya operasional sekolah tidak terpenuhi. Selain itu, kebijakan sekolah gratis terbukti efektif dalam meningkatkan kuantitas siswa sekolah, data menunjukkan 49,28% siswa bertambah setelah diterapkannya kebijakan ini. Motivasi siswa dan orang tua untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masih rendah, hanya 30% orang tua yang menunjukkan motivasi untuk berinvestasi di bidang pendidikan, selebihnya terpapar dampak sekolah gratis dengan mentalitas serba gratis dan menjadi peminta-minta (A. Rahman & Nasihin, 2020).

Implementasi kebijakan merdeka belajar dan gratis menyatakan bahwa terdapat kendala yang sangat urgen salah satunya adalah belum sepenuhnya memahami esensi dari merdeka belajar sehingga belum dapat mengoptimalkan penguatan profil pelajar Pancasila. Diharapkan akan ada penelitian lanjutan yang langsung mengobservasi lapangan agar memperoleh informasi secara langsung untuk memberikan solusi alternatif pada kebijakan pemerintah terkait pendidikan pada tahap berikutnya terutama pendidikan gratis (Utami et al., 2022).

Kebijakan sekolah gratis memiliki dampak yang signifikan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan pendidikan tanpa biaya dapat menunda usia pernikahan dan tingkat kesuburan dengan menjaga populasi usia sekolah tetap terlibat dalam pendidikan (Bhuwania et al., 2023). Selain itu, kebijakan seperti *Free Senior High School (FSHS)* atau Sekolah Menengah Atas Gratis terbukti meningkatkan akses pendidikan, mengatasi masalah rendahnya tingkat transisi antara pendidikan menengah pertama dan menengah atas (Asante et al., 2022).

Kebijakan sekolah bebas tembakau juga efektif dalam mengurangi paparan asap rokok, menciptakan lingkungan yang lebih sehat, dan mempengaruhi perilaku penggunaan tembakau (M. Rahman et al., 2015). Kebijakan ini terkait dengan penurunan paparan asap rokok di kalangan siswa (Azagba et al., 2015). Lebih lanjut, desentralisasi formulasi kebijakan seperti yang diamati pada sekolah gratis di Inggris, dipandang positif karena mempromosikan struktur negara yang terdesentralisasi dan pasca-birokratis, meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil, dan berpotensi memperbaiki hasil kebijakan (Williams, 2023). Selain itu, peran sekolah menengah swasta di daerah pedesaan dalam kebijakan pendidikan gratis telah dipelajari untuk memahami kontribusi mereka terhadap sistem pendidikan (Ogawa, 2021).

Namun, implementasi kebijakan sekolah gratis menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat keberhasilannya. Salah satu tantangan utama adalah sentralisasi keputusan administratif

selama perumusan dan pelaksanaan kebijakan, yang menyebabkan kesenjangan dalam administrasi, fasilitas pendidikan, dan sumber daya (Asante et al., 2022). Kekurangan staf, keterampilan manajemen keuangan yang terbatas, resistensi dari orang tua, dan fasilitas fisik yang tidak memadai juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di sekolah dasar (Mr. et al., 2020).

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang langkah-langkah dalam proses implementasi, kesulitan dalam menyesuaikan pola pembelajaran, dan kebutuhan akan infrastruktur yang memadai dapat menghambat penerapan sistem pendidikan ganda (Ningsih & Santosa, 2020). Faktor-faktor seperti anggaran sekolah yang terbatas, jumlah guru, dan kepadatan aktivitas guru juga menjadi penghalang dalam penerapan kebijakan sekolah ramah anak (Rangkuti & Maksum, 2019). Penegakan kebijakan sekolah bebas tembakau sangat penting untuk memastikan efektivitasnya (Terry & Zhang, 2016). Kurangnya dukungan, seperti yang terlihat dalam tantangan yang dihadapi dalam penerapan perangkat lunak sumber terbuka di lingkungan pendidikan, juga dapat menghambat keberhasilan kebijakan (Thankachan & Moore, 2017).

Untuk mengatasi kualitas pendidikan tertuma penilaian, evaluasi kurikulum, kualitas pengajaran, hasil belajar siswa, dan kesetaraan pendidikan di berbagai sekolah, menjadi urgent dalam pendidikan. Peran sekolah dalam mempertahankan ketidaksetaraan pendidikan merupakan faktor penting untuk diperhatikan (Schmidt et al., 2015). Status sosial ekonomi (SES) berperan signifikan dalam pencapaian siswa, namun bukan satu-satunya faktor, sehingga perlu menangani berbagai faktor yang mempengaruhi hasil pendidikan. Akuntabilitas di sekolah, khususnya akuntabilitas yang tinggi, dapat menantang atau memperkuat ketidaksetaraan (Diamond & Spillane, 2004). Sekolah dengan kinerja tinggi yang fokus pada peningkatan kinerja semua siswa, terlepas dari tingkat kelas atau mata pelajaran, dapat berkontribusi pada hasil pendidikan yang lebih adil.

Dampak pengeluaran sekolah terhadap pencapaian pendidikan juga merupakan aspek penting untuk diperhatikan (Hyman, 2017). Reformasi pembiayaan pendidikan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan dengan menyamakan pengeluaran di seluruh distrik sekolah berpotensi meningkatkan kesetaraan pendidikan. Kesetaraan pendidikan mencakup akses ke sekolah dan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa (Wang et al., 2021). Evaluasi kesetaraan dan paritas dalam sistem pendidikan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas mencapai semua siswa secara merata.

Mencapai kesetaraan pendidikan memerlukan respons inovatif untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemik dalam pendidikan publik (Hertzog, 2023). Implementasi inisiatif kesetaraan yang berdampak pada akses ke pembelajaran tingkat lanjut dapat membantu mengatasi disparitas dalam peluang pendidikan Kalimantan Timur, dengan luas wilayah yang signifikan dan beragam, menghadapi tantangan unik dalam sektor pendidikan. Di beberapa kabupaten, khususnya yang terletak di daerah terpencil, akses ke pendidikan yang memadai masih menjadi masalah utama. Sekolah-sekolah di daerah ini sering kali kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, buku pelajaran, dan alat bantu belajar lainnya. Kondisi geografis yang sulit juga mempersulit transportasi, sehingga siswa harus

menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, termasuk inisiatif sekolah gratis dan peningkatan anggaran pendidikan.

Angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih tinggi menunjukkan bahwa problem ekonomi terus menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2020, lebih dari 9.000 anak di Kaltim tidak dapat melanjutkan pendidikan. Jenjang SMA menjadi yang paling terdampak dengan 3.087 anak putus sekolah, diikuti oleh jenjang SMP dengan 2.389 anak, SMK dengan 1.651 anak, dan SD dengan 1.953 anak. Data ini mencerminkan masalah serius yang mengancam hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan. pada tahun 2020, temuan menunjukkan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, rata-rata hanya mencapai 30% dari keseluruhan biaya operasional (Ramadhani & Hidayati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan pendidikan dasar gratis tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana dari BOS. Ada sumber-sumber lain yang memfasilitasi penyediaan pendidikan gratis. Salah satu aspek yang penting adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah. Sumber pendanaan lainnya adalah kontribusi dari orang tua murid. Pelaksanaan pendidikan dasar gratis tidak berarti tidak adanya pembayaran dari orang tua murid. Pembayaran yang disebutkan di atas bersifat sukarela, yang berarti bahwa pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya kesepakatan antara orang tua dan lembaga pendidikan.

Meskipun kebijakan sekolah gratis bertujuan mulia, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai masalah, seperti kekurangan dana operasional, kualitas pendidikan yang tidak merata, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Identifikasi masalah spesifik dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan sekolah gratis telah diimplementasikan secara efektif di SMKN Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini penting karena hasilnya dapat memberikan gambaran nyata tentang keberhasilan program serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Penelitian oleh Owens menyoroti segregasi pendapatan antara distrik sekolah sebagai faktor kunci yang menciptakan ketidaksetaraan dalam sumber daya ekonomi dan sosial yang tersedia bagi siswa yang diuntungkan dan dirugikan (Owens, 2017). Segregasi pendapatan ini menyebabkan disparitas dalam kualitas dan sumber daya sekolah, yang pada akhirnya memengaruhi pencapaian siswa. Selain itu, studi oleh Baker dan Mayer menekankan ketahanan ketimpangan pendanaan antar distrik dan dampak segregasi ekonomi pada hasil pendidikan (Baker & Welner, 2010; Mayer, 2002). Pendanaan sekolah lokal berdasarkan pendapatan rata-rata distrik dapat mempengaruhi kualitas dan pengeluaran sekolah, memperburuk disparitas antara distrik.

Matheny menekankan peran segregasi sekolah dalam memusatkan siswa di sekolah dengan tingkat sumber daya yang bervariasi, yang mengarah pada peningkatan kesenjangan pencapaian (Matheny et al.,

2023). Sependapat dengan hal itu, Owens mengatakan terdapat segregasi antar distrik dapat menghasilkan ketidaksetaraan sumber daya, yang selanjutnya berkontribusi pada pencapaian akademik yang tidak merata (Owens, 2017). Selain itu, keterbatasan dalam mengejar kesetaraan guru melalui regulasi departemen, menyoroti ketidaksetaraan sumber daya yang persisten antara distrik sekolah yang sangat tersegregasi (Baker & Weber, 2016). Hal ini menggarisbawahi perlunya menangani kesenjangan sumber daya yang lebih luas antara distrik untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan.

Kesediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis. Penelitian telah menunjukkan bahwa tantangan seperti dukungan material yang tidak memadai, sumber daya, pendanaan, dan waktu dapat menghambat penerapan perawatan berbasis bukti atau pedoman (Cochrane et al., 2007). Dalam konteks pengajaran yang berbeda, guru telah menekankan pentingnya waktu persiapan untuk penerapan yang efektif, yang menyoroti signifikansi ketersediaan sumber daya (Smale-Jacobse et al., 2019). Tantangan unik yang dihadapi oleh sekolah pedesaan, termasuk keterbatasan sumber daya dan pendanaan, dapat menghambat inisiatif seperti Intervensi dan Dukungan Perilaku Positif Seluruh Sekolah (SWPBIS) (Gage et al., 2022). Persepsi guru tentang pengajaran yang berbeda telah menyoroti hambatan seperti kurangnya sumber daya, waktu, dukungan, pengetahuan, dan ukuran kelas yang dapat menghalangi pelaksanaan yang sukses (Shareefa et al., 2019). Selain itu, tantangan dalam menerapkan pengajaran yang berbeda di sekolah umum mencakup keterbatasan sumber daya, masalah perilaku siswa, dan kurangnya waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan, yang menekankan dampak keterbatasan sumber daya pada praktik pendidikan (Gibbs, 2022).

Dalam konteks ini, terdapat problem utama mengenai pelaksanaan sekolah gratis, implementasi di tingkat sekolah, dan isu-isu tambahan mengenai jaminan kualitas proses pembelajaran dan kualitas lulusan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan sekolah gratis melalui analisis kerangka teori, strategi implementasi kebijakan, dan persepsi masyarakat. Inisiatif ini merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengimplementasikan ketentuan konstitusional yang menjamin hak atas pendidikan bagi semua individu. Program khusus ini belum diimplementasikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) Negeri Kutai kartanegara, sehingga membuat penulis tertarik untuk malukan penelitian dalam tesis ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam konteks yang alami dan sesungguhnya, berbeda dengan kondisi laboratorium atau yang terkendali. Menurut Williams dalam Hardani dkk. (2020), penelitian kualitatif berfokus pada penelaahan fenomena sosial dan budaya dalam lingkungan yang berlangsung secara wajar dan alami. Metode deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan signifikan. Tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang terdapat

di masyarakat atau organisasi yang menjadi objek studi. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jangka waktu pelaksanaan selama enam bulan, mulai dari Februari hingga Juli 2024. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya sejumlah permasalahan yang signifikan terkait dengan analisis implementasi kebijakan sekolah gratis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis dan Permasalahannya

Hasil penelitian ini berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan informan yang mengacu pada indikator implementasi kebijakan dari Grindle (1980). Indikator tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi koordinasi kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi terkait untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan Sekolah gratis dalam implementasinya di lapangan dilihat dari permasalahan yang muncul di lokasi penelitian, dapat dilihat pada paparan berikut:

Angka putus sekolah di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih tinggi menunjukkan bahwa problem ekonomi terus menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, pada tahun 2020, lebih dari 9.000 anak di Kaltim tidak dapat melanjutkan pendidikan. Jenjang SMA menjadi yang paling terdampak dengan 3.087 anak putus sekolah, diikuti oleh jenjang SMP dengan 2.389 anak, SMK dengan 1.651 anak, dan SD dengan 1.953 anak. Data ini mencerminkan masalah serius yang mengancam hak dasar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Laporan BPS ini menguatkan bahwa penyebab utama dari tingginya angka putus sekolah di Kaltim adalah masalah ekonomi, yang menjadi penghalang utama bagi banyak keluarga untuk mempertahankan anak-anak mereka di sekolah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan, kenyataannya masih banyak anak yang terpaksa meninggalkan sekolah karena ketidakmampuan keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung secara ekonomi diperlukan untuk mengurangi angka putus sekolah ini, dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga kurang mampu agar semua anak di Kaltim memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas.

Berkaitan dengan kebijakan sekolah gratis yang dilakukan melalui program Bantuan Operasional sekolah (BOS) untuk jenjang SMKN yang diaksanakan oleh pemerintah Kutai Kartanegara, paling tidak terdapat dua persoalan mendasar dalam proses implementasinya yaitu kebijakannya sendiri dan lingkungan kebijakan. Dari aspek kebijakannya sendiri dapat dikaji bahwa sekolah gratis tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka perluasan dan pemerataan pendidikan menengah kejuruan. Dalam hal ini pendekatan kebijakan adalah pendekatan dari atas (*top*



*down policy*) yang dimaksudkan untuk merubah perilaku lingkungan kebijakan. Kebijakan sekolah gratis memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia yang telah memasuki usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Kebijakan sekolah gratis merupakan kemauan politik pemerintah yang lebih banyak bersifat politis dan menempatkan sekolah gratis menjadi fokus sistem pendidikan Indonesia memberikan perhatian khusus pada pendidikan dasar gratis untuk semua anak. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar memiliki keunggulan kompetitif dan daya tawar yang tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu pendidikan menjadi peluang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak memperoleh pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat dan bangsa. Kebijakan sekolah gratis ini menjadi fokus utama pemerintah pusat dalam bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bekerja sama dengan kementerian lainnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Di tingkat provinsi, pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, yang semuanya bertindak sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional di daerah masing-masing. Salah satu contohnya adalah SMKN Kutai Kartanegara, yang turut menghilangkan aspek bahasan dengan fokus pada penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan.

Peraturan Daerah (Perda) No. 03 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pendidikan gratis bagi peserta didik di jenjang pendidikan wajib, yang dalam hal ini meliputi Wajib Belajar 12 Tahun. Pasal 18 secara eksplisit melarang pemungutan biaya wajib dari orang tua atau wali peserta didik, yang sejalan dengan kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara. Namun, meskipun biaya wajib dilarang, Perda ini juga mengakui adanya peran serta sukarela dari orang tua/wali dalam bentuk sumbangan, bantuan tenaga, atau pemikiran, yang diatur dalam Pasal 18 ayat 2 dan Pasal 62 ayat 1. Ini membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah, asalkan dilakukan secara sukarela dan transparan. Pada tataran implementatif kebijakan sekolah gratis tidak adanya model keseimbangan antara kebutuhan finansial sekolah dan aturan yang melarang pungutan wajib. Sekolah perlu lebih hati dalam setiap sumbangan yang diterima benar-benar bersifat sukarela dan tidak ada tekanan atau kewajiban bagi orang tua/wali untuk menyumbang. Selain itu, pengelolaan dana dari sumbangan tersebut harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Pasal 62 ayat 5.

Untuk mengatasi potensi masalah, SMKN Kutai Kartanegara dapat memperkuat peran Komite Sekolah dalam menyalurkan dan mengawasi dana partisipasi masyarakat, seperti yang diatur dalam

Pasal 18 ayat 4. Pengawasan dan pelaporan yang transparan kepada Dinas Pendidikan dan masyarakat juga akan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan sekolah gratis. Dengan adanya Perda ini, implementasi kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara diharuskan pengelolaan biaya diharuskan transparan penuh integritas.

Pasal 61 juga tegas menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan biaya operasional kepada sekolah-sekolah di semua jenjang pendidikan. Dalam konteks SMKN Kutai Kartanegara, ini berarti bahwa sekolah ini menerima bantuan operasional dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, yang mendukung pelaksanaan kebijakan sekolah gratis. Selain itu, pada Pasal 61 ayat 7-9 menegaskan bahwa sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang memungut biaya dari orang tua/wali peserta didik. Ini sejalan dengan prinsip kebijakan sekolah gratis di SMKN Kutai Kartanegara, di mana peserta didik tidak dibebani biaya wajib untuk pendidikan mereka. Pengelolaan dana operasional yang diterima oleh sekolah harus sesuai dengan ketentuan pemerintah, yang mencakup transparansi dan akuntabilitas agar dana sekolah tersebut digunakan secara efektif untuk mendukung operasional sekolah tanpa membebani orang tua/wali.

### **Distribusi Siswa dan Guru**

Jumlah siswa SMKN tahun 2023 mencapai 14.460 orang. Di Kutai Kartanegara, terdapat beberapa SMK dengan jumlah guru dan siswa yang bervariasi. Misalnya, SMK Negeri 2 Tenggarong memiliki 72 guru dan 1.170 siswa, sementara SMK Negeri 1 Loa Janan memiliki 21 guru dan 95 siswa. SMK Negeri 1 Muara Badak memiliki 22 guru yang mengajar 339 siswa, dan SMK Negeri 1 Marangkayu memiliki 25 guru yang mengajar 317 siswa. Di Sebulu, SMK Negeri 1 memiliki 22 guru untuk 375 siswa, dan SMK Negeri 2 memiliki 23 guru untuk 373 siswa. Total keseluruhan guru di sekolah-sekolah tersebut adalah 185 orang, dengan jumlah siswa sebanyak 2.669 orang. Kepala sekolah umumnya berpendidikan S2, sedangkan sebagian besar guru memiliki kualifikasi S1. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam tabel:

**Tabel. 1**  
**Jumlah Tenaga Pendidik berdasarkan Sekolah**

<b>Nama Sekolah</b>	<b>Kepala Sekolah</b>	<b>Guru</b>	<b>Siswa</b>	<b>Orang Tua</b>	<b>Total Informan</b>
SMK Negeri 2 Tenggarong	1	1	3	2	7
SMK Negeri 1 Loa Janan	1	1	3	2	7
SMK Negeri 1 Muara Badak	1	1	3	2	7
SMK Negeri 1 Marangkayu	1	1	3	2	7
SMK Negeri 1 Sebulu	1	1	3	2	7
SMK Negeri 2 Sebulu	1	1	3	2	7
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>42</b>

Sumber: data diolah, 2023

Pengambilan sampel untuk mengisi angket dilakukan secara purposif dan mendadak, atas rekomendasi kepala sekolah yang bersangkutan. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara. Untuk informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, diwakili oleh staf yang terlibat dalam keanggotaan program BOS. Pengumpulan data dari mereka diperoleh melalui wawancara dan

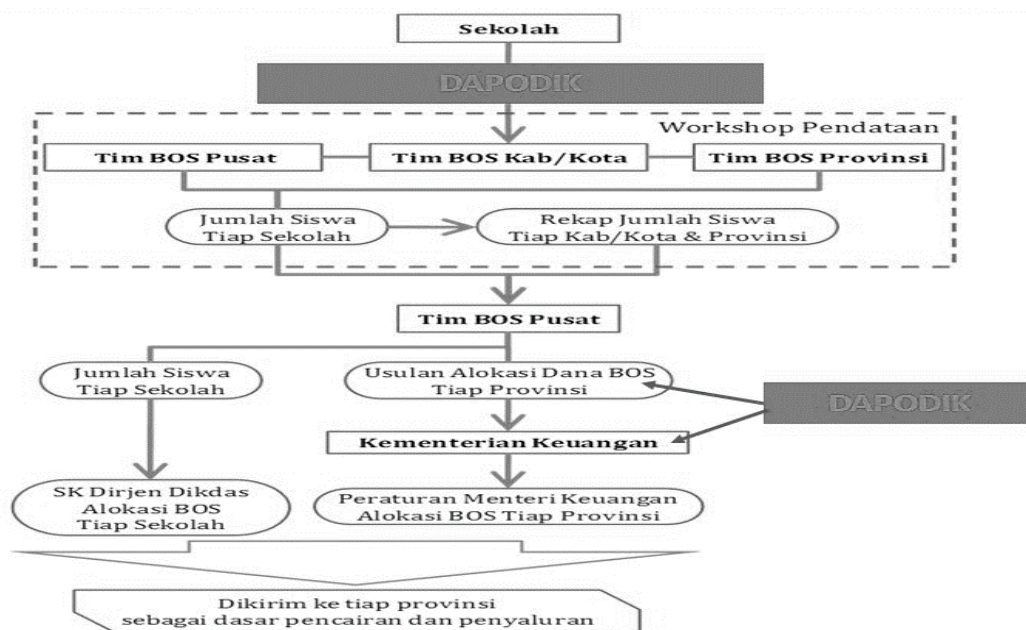
penyebaran angket. Mengenai status pendidikan informan dan responden (orang tua siswa), bervariasi mulai dari lulusan SMP hingga perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2**  
**Status Pendidikan Informan**

Nama Sekolah	Pendidikan			
	Kepala Sekolah	Guru	Komite Sekolah	Orang Tua
SMK Negeri 2 Tenggarong	S2	S1	S1	beragam
SMK Negeri 1 Loa Janan	S2	S1	S1	beragam
SMK Negeri 1 Muara Badak	S2	S1	S1	beragam
SMK Negeri 1 Marangkayu	S2	S1	S1	beragam
SMK Negeri 1 Sebulu	S2	S1	S1	beragam
SMK Negeri 2 Sebulu	S2	S1	S1	beragam

Sumber: profil Sekolah tahun 2023

Masing-masing sekolah memiliki pengurusan komite sekolah yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Para komite sekolah bekerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua siswa untuk memikirkan langkah-langkah strategis yang harus dipenuhi guna meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah. Kerjasama, koordinasi, dan komunikasi antar komite sekolah dengan pihak sekolah sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari komite sekolah berperan aktif dalam menggalang dana tambahan, mengatur kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi orang tua, serta mendengarkan masukan para orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah.



**Gambar1**  
**Alur Pendistribusian Bantuan Sekolah Gratis**

Sumber: *Data sekolah, 2023*

Gambar ini menggambarkan proses pendataan dan pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia, yang dimulai dari pengumpulan data di tingkat sekolah hingga pencairan dana oleh pemerintah pusat. Proses ini dimulai ketika sekolah-sekolah memasukkan data terkait jumlah

siswa dan informasi relevan lainnya ke dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang merupakan basis data nasional untuk pendidikan di Indonesia. Data yang diinput oleh sekolah kemudian digunakan oleh berbagai tim BOS di tingkat kabupaten/kota dan provinsi untuk merekapitulasi jumlah siswa di wilayah mereka masing-masing. Setelah data siswa direkapitulasi, Tim BOS Pusat, yang bertanggung jawab di tingkat nasional, mengajukan usulan alokasi dana BOS untuk tiap provinsi. Usulan ini dikirimkan ke Kementerian Keuangan, yang kemudian akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar untuk menentukan alokasi dana BOS bagi tiap provinsi. Kementerian Keuangan menggunakan data yang ada di Dapodik untuk memverifikasi bahwa alokasi dana sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar. Selanjutnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar (Dirjen Dikdas) akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan alokasi dana BOS untuk setiap sekolah berdasarkan data siswa yang telah diverifikasi. Setiap sekolah akan menerima dana sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar, sehingga kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi secara adil dan merata. Dana BOS yang telah dialokasikan dikirimkan ke tiap provinsi, dan dari sana, dana tersebut disalurkan ke sekolah-sekolah yang berhak menerimanya. Alur tersebut dirancang agar transparansi dan akurasi dalam pengalokasian dana pendidikan, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang merata dan berkualitas.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penelitian ini dapat menyimpulkan beberapa hal berikut. *Pertama*, implementasi kebijakan sekolah gratis di SMKN Kabupaten Kutai Kartanegara dan menemukan bahwa meskipun kebijakan ini berhasil dalam meningkatkan akses pendidikan serta meringankan beban ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, kendala yang signifikan masih ada pada problem internal dan eksternal. Salah satu temuan penting adalah bahwa masalah fasilitas, ketersediaan sumber daya, dan pengelolaan dana menjadi faktor penghambat yang serius dalam mencapai potensi penuh dari kebijakan sekolah gratis. Kendala-kendala ini belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, yang sering kali hanya berfokus pada manfaat langsung dari kebijakan sekolah gratis. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan mengungkapkan bahwa untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, perlu ada perhatian lebih terhadap aspek teknis dan manajerial dari pelaksanaan kebijakan ini. *Kedua*, penelitian ini menemukan adanya dampak pada penurunan motivasi belajar pada sebagian siswa dari keluarga mampu. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah gratis, meskipun dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan secara merata, dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diantisipasi. Penurunan motivasi ini mungkin disebabkan oleh persepsi siswa bahwa pendidikan menjadi kurang berharga ketika tidak ada biaya yang terlibat, terutama bagi mereka yang sebelumnya tidak mengalami kesulitan ekonomi. Temuan ini menyoroti perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengatasi dampak ini, sehingga program sekolah

gratis dapat benar-benar bermanfaat bagi seluruh siswa tanpa memandang latar belakang ekonomi mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, M. F. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Tanjung Selor). *Jurnal Paradigma*, 5(2), 71–78.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Al-Shuaili, A. (2012). Omani Science Teachers' Perceptions of the Difficulties in Using Creative Teaching Methods. *Journal of Educational and Psychological Studies [Jeps]*, 6(3), 23. <https://doi.org/10.24200/jeps.vol6iss3pp23-30>
- Alhadi, S., & Saputra, W. N. E. (2017). *The Relationship Between Learning Motivation and Learning Outcome of Junior High School Students in Yogyakarta*. <https://doi.org/10.2991/yicemap-17.2017.23>
- Asante, G., Nkansah, G. B., & Agbee, D. (2022). (De)centralisation in Fee-Free Policymaking Process: Comparative Review of Progressive Free Senior High and Free Senior High School Policies in Ghana. *Policy Futures in Education*, 22(1), 66–89. <https://doi.org/10.1177/14782103221135919>
- Ayeni, A. J., & Amanekwe, A. P. (2018). Teachers' Instructional Workload Management and Students' Academic Performance in Public and Private Secondary Schools in Akoko North-East Local Government, Ondo State, Nigeria. *American International Journal of Education and Linguistics Research*, 1(1), 9–23. <https://doi.org/10.46545/aijelr.v1i1.24>
- Azagba, S., Kennedy, R. D., & Baskerville, B. (2015). Smoke-Free School Policy and Exposure to Secondhand Smoke: A Quasi-Experimental Analysis. *Nicotine & Tobacco Research*, 18(2), 170–176. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntv077>
- Baghian, N., Shati, M., Sari, A. A., Eftekhari, A., Rasolnezhad, A., Nanaei, F., & Ahmadi, B. (2023). Barriers to Mental and Social Health Programs in Schools: A Qualitative Study. *Iranian Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.18502/ijps.v18i2.12360>
- Baker, B. D., & Weber, M. (2016). State School Finance Inequities and the Limits of Pursuing Teacher Equity Through Departmental Regulation. *Education Policy Analysis Archives*, 24, 47. <https://doi.org/10.14507/epaa.24.2230>
- Baker, B. D., & Welner, K. G. (2010). Premature Celebrations: The Persistence of Inter-District Funding Disparities. *Education Policy Analysis Archives*, 18, 9. <https://doi.org/10.14507/epaa.v18n9.2010>
- Bartfeld, J., Berger, L. M., Men, F. K., & Chen, Y. (2019). Access to the School Breakfast Program Is Associated With Higher Attendance and Test Scores Among Elementary School Students. *Journal of Nutrition*, 149(2), 336–343. <https://doi.org/10.1093/jn/nxy267>

- Bhuwania, P., Huh, K., & Heymann, J. (2023). Impact of Tuition-Free Education Policy on Child Marriage and Early Childbearing: Does Secondary Matter More? *Population and Development Review*, 49(1), 43–70. <https://doi.org/10.1111/padr.12538>
- Casely-Hayford, L. (2024). *The Intended and Unintended Effects of Secondary School Fee Abolition: Evidence From Ghana's Free Senior High School Policy*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/hsp7b>
- Chibali, W., & Mwami, J. (2022). Teachers' Attitude on Implementing the Free Basic Education in Kiteto District Council, Tanzania. *East African Journal of Education Studies*, 5(3), 29–41. <https://doi.org/10.37284/eajes.5.3.854>
- Cochrane, L. J., Olson, C. A., Murray, S., Dupuis, M., Tooman, T., & Hayes, S. M. (2007). Gaps Between Knowing and Doing: Understanding and Assessing the Barriers to Optimal Health Care. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 27(2), 94–102. <https://doi.org/10.1002/chp.106>
- Cohen, J. F., Hecht, A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). Universal School Meals and Associations With Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. *Nutrients*, 13(3), 911. <https://doi.org/10.3390/nu13030911>
- Diamond, J. B., & Spillane, J. P. (2004). High-Stakes Accountability in Urban Elementary Schools: Challenging or Reproducing Inequality? *Teachers College Record*, 106(6), 1145–1176. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00375.x>
- Edwards III, G. C., Barrett, A., & Peake, J. (1997). The legislative impact of divided government. *American Journal of Political Science*, 545–563.
- Farida, N., & Maulana, A. (2022). Strategi Program Bus Sekolah Gratis Bagi Resiko Pelajar Dalam Berjalan Lintas di Kabupaten Jember (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4).
- Feriansyah, A. (2024). Implementation of Tender Activities for Procurement of Government Goods and Services Electronically (E-Procurement). *International Journal of Research in Commerce and Management Studies*, 06(02), 32–45. <https://doi.org/10.38193/ijrcms.2024.6204>
- Gage, N. A., Kern, L., George, H. P., Elfner, K., & Robbie, K. (2022). Exploring SWPBIS Implementation Outcomes in Rural and Urban Schools in Florida. *Rural Special Education Quarterly*, 41(3), 129–139. <https://doi.org/10.1177/87568705221094560>
- Gibbs, K. (2022). Voices in Practice: Challenges to Implementing Differentiated Instruction by Teachers and School Leaders in an Australian Mainstream Secondary School. *The Australian Educational Researcher*, 50(4), 1217–1232. <https://doi.org/10.1007/s13384-022-00551-2>
- Giesecke, K., Goldberg, L. R., & Ding, X. (2011). A top-down approach to multiname credit. *Operations Research*, 59(2), 283–300.
- Godda, H. (2018). Free Secondary Education and the Changing Roles of the Heads of Public Schools in

- Tanzania: Are They Ready for New Responsibilities? *Open Journal of Social Sciences*, 06(05), 1–23. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.65001>
- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: what can be done? *Public Administration and Development*, 15(5), 441–463.
- Hairan, H. (2024). Regulation of Education Implementation in Kutai Kartanegara Based on Education Policy. *Law and Safety*, 92(1), 133–141. <https://doi.org/10.32631/pb.2024.1.12>
- Hariyanto, D., Arafat, Y., & Wardiah, D. (2021). The Effect of Facilities and Motivation on Learning Outcomes of High School Students in Gelumbang, Indonesia. *Journal of Social Work and Science Education*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.52690/jswse.v2i1.210>
- Haryaningsih, S., Yohanes, Y., Sihaloho, N. T. P., & Andriani, F. D. (2022). The implementation of MSMEs Protection Policies during the Covid-19 Pandemic. *Khazanah Sosial*, 4(4), 731–744. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i4.19250>
- Hertzog, N. B. (2023). School District Equity Initiatives That Impact Access to Accelerated and Advanced Learning. *Gifted Child Quarterly*, 67(4), 325–336. <https://doi.org/10.1177/00169862231186669>
- Hyman, J. (2017). Does Money Matter in the Long Run? Effects of School Spending on Educational Attainment. *American Economic Journal Economic Policy*, 9(4), 256–280. <https://doi.org/10.1257/pol.20150249>
- Ibrahim, R. A. (2024). Analysis of the Availability and Gaps of Educational Facilities in Teluk Bintuni Regency Papua. *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 4(2), 43–48. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v4i2.620>
- Imperial, M. T. (2021). Implementation structures: The use of top-down and bottom-up approaches to policy implementation. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Johnson, C., & Start, D. (2001). *Rights, claims and capture: Understanding the politics of pro-poor policy*. Overseas Development Institute London.
- Jones, C. O. (1979). American politics and the organization of energy decision making. *Annual Review of Energy*, 4(1), 99–119.
- Jones, C., & Palikara, O. (2023). How Do Parents and School Staff Conceptualize Parental Engagement? A Primary School Case Study. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.990204>
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 31–36.
- Mangare, A. C. (2023). Implementation of School Culture-Based Character Education Strengthening Program at SMP Negeri 10 Satap Tondano. *Technium Social Sciences Journal*, 43, 241–251. <https://doi.org/10.47577/tssj.v43i1.8868>
- Matheny, K. T., Thompson, M. E., Townley-Flores, C., & Reardon, S. F. (2023). Uneven Progress:

- Recent Trends in Academic Performance Among U.S. School Districts. *American Educational Research Journal*, 60(3), 447–485. <https://doi.org/10.3102/00028312221134769>
- Mayer, S. E. (2002). How Economic Segregation Affects Children's Educational Attainment. *Social Forces*, 81(1), 153–176. <https://doi.org/10.1353/sof.2002.0053>
- Mazmanian, D. H. (n.d.). dan Paul A. Sabatier.(1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, D. S. Van, & Van Horn, C. E. (1978). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Frame Administration & Society*. Sage Publication. Inc.
- Michelson, E. S. (2021). Science philanthropy, energy systems research, and societal responsibility: A match made for the 21st century. *Energy Research & Social Science*, 72(January), 101886. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101886>
- Moradi, T. (2023). Challenges of Budgeting and Public Financial Management in Iran's Health System: A Qualitative Study. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*. <https://doi.org/10.47176/mjiri.37.80>
- Mr., F. D., Muneja, M. S., & Ilomo, O. (2020). Challenges on the Implementation of Free Education Policy in Tanzania: A Case of Public Primary Schools in Babati Town. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 1(3), 32–38. <https://doi.org/10.46606/eajess2020v01i03.0040>
- Ndolo, M. A., & Simatwa, E. M. (2016). Impact of Free Secondary Education Policy on Primary to Secondary Education Transition Rate in Kenya: A Case Study of Mbita and Suba Sub- Counties. *Educational Research Journal*, 07(02). <https://doi.org/10.14303/er.2016.126>
- Ng, S. W. 吳., & Lee, T. (2015). How Parents Were Involved in a Special School in Hong Kong. *International Journal of Educational Management*, 29(4), 420–430. <https://doi.org/10.1108/ijem-07-2014-0095>
- Ningsih, T. K., & Santosa, B. (2020). Dual Education System in SMK Muhammadiyah Wanareja. *Journal of Vocational Education Studies*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.12928/joves.v2i2.1206>
- Ogawa, M. (2021). The Role of Low-Cost Private Secondary Schools in Rural Kenya Under the 'Free Secondary Education Policy.' *Journal of International Comparative Education*, 10(2), 97–115. <https://doi.org/10.14425/jice.2021.10.2.1205>
- Owens, A. M. D. (2017). Income Segregation Between School Districts and Inequality in Students' Achievement. *Sociology of Education*, 91(1), 1–27. <https://doi.org/10.1177/0038040717741180>
- Pangestu, R. P. A. G. (2023). *Evaluasi Implementasi Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo*. UNS (Sebelas Maret University).
- Puspitoningrum, I. D. (2009). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri I Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009*. UNS (Sebelas Maret University).
- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102–116.



- Rahman, M., Shojaei, A., Karim, J., Pangkas, J., Hun, T. J., & Suhaili, M. R. B. (2015). Teachers Perception on Tobacco Free School in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Medical Science*, 14(3), 274–279. <https://doi.org/10.3329/bjms.v14i3.18470>
- Ramadhani, A. K., & Hidayati, A. (2024). The Effect of Organizational Commitment on the Effectiveness of School Operational Assistance Funds in Elementary Schools in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(2), 411–419.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok. *Natapraja*, 7(2), 231–244. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Redding, C., & Grissom, J. A. (2021). Do Students in Gifted Programs Perform Better? Linking Gifted Program Participation to Achievement and Nonachievement Outcomes. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 43(3), 520–544. <https://doi.org/10.3102/01623737211008919>
- Rulyansah, A., Mardhotillah, R. R., Budiarti, R. P. N., Authar, N., & Firdhausyah, Y. A. (2023). Pembelajaran Berpikir Komputasional serta Lomba Gratis bagi Siswa dan Guru SDN II Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 153–160.
- Sabani, F., & Lutfia, I. L. (2023). Penguatan Pendidikan di Masyarakat Melalui Vitalisasi Pendidikan Non Formal di Kota Palopo. *Jurnal Sinestesia*, 13(1), 267–276.
- Schmidt, W. H., Burroughs, N., Zoido, P., & Houang, R. T. (2015). The Role of Schooling in Perpetuating Educational Inequality. *Educational Researcher*, 44(7), 371–386. <https://doi.org/10.3102/0013189x15603982>
- Shareefa, M., Moosa, V., Zin, R. M., Abdullah, N. Z. M., & Jawawi, R. (2019). Teachers' Perceptions on Differentiated Instruction: Do Experience, Qualification and Challenges Matter? *International Journal of Learning Teaching and Educational Research*, 18(8), 214–226. <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.8.13>
- Smale-Jacobse, A., Meijer, A., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2019). Differentiated Instruction in Secondary Education: A Systematic Review of Research Evidence. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02366>
- Sobandi, A., Yuniarsih, T., Rasto, & Adman. (2020). Learning Facilities: Can It Improve the Vocational School Productivity? *Journal of Educational and Social Research*, 10(4), 146. <https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0074>
- Soenarto, S., Amin, M. M., & Kumaidi, K. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan program 4 tahun dalam meningkatkan employability lulusan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 21(2), 215–227.
- Stanley, J. M., & Wyness, M. (1999). Living With Parental Involvement: A Case Study of Two “Open Schools.” *International Studies in Sociology of Education*, 9(3), 239–266.

<https://doi.org/10.1080/09620219990200047>

- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif* (M. S. Sofia Yustiani Suryandri, SE (ed.); III). ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Sukma, N. I., & Jayadi, A. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 312–316.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. In *Universitas Diponegoro*.
- Tawiah, D., & Addai-Mensah, P. (2023). The Effectiveness of the Free Senior High School Policy in Ghana: A Moral Development Perspective. *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 487–500. <https://doi.org/10.38159/ehass.20234419>
- Terry, A., & Zhang, N. J. (2016). The Impact of Tobacco-Free School Policies on Youth Smoking Rates in Florida Public School Districts. *Journal of School Health*, 86(2), 129–134. <https://doi.org/10.1111/josh.12360>
- Thankachan, B., & Moore, D. R. (2017). Challenges of Implementing Free and Open Source Software (FOSS): Evidence From the Indian Educational Setting. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(6). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i6.2781>
- Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Minahasa Utara. *GOVERNANCE*, 3(1).
- Utami, W. B., Wedi, A., & Aulia, F. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 6(3), 285–294.
- Wang, Y., Liu, Y., Xing, L., & Zhang, Z. (2021). An Improved Accessibility-Based Model to Evaluate Educational Equity: A Case Study in the City of Wuhan. *Isprs International Journal of Geo-Information*, 10(7), 458. <https://doi.org/10.3390/ijgi10070458>
- Warman, W., Poernomo, S. A., Januar, S., & Amon, L. (2021). Leadership Style and Principal Supervision in Improving Teacher Performance at State High Schools in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, Indonesia. *Eduline Journal of Education and Learning Innovation*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline581>
- Williams, B. (2023). The 2010–15 Coalition Government and the Legacy of Free Schools in England. *Policy Futures in Education*, 22(5), 793–809. <https://doi.org/10.1177/14782103231176360>
- Zhang, X., Guo, J., Li, M., Xu, R., Wang, J., Yang, Y., & Shen, H. (2023). Teacher Stress Among Public Primary and Secondary Schoolteachers in Datong, a City of Shanxi Province, China: Association Between Teacher Stress and Standardized Workload. *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, 36(2), 161–176.

<https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01948>

- Abubakar, M. F. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Tingkat Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Di Sma Negeri 1 Tanjung Selor). *Jurnal Paradigma*, 5(2), 71–78.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Al-Shuaili, A. (2012). Omani Science Teachers' Perceptions of the Difficulties in Using Creative Teaching Methods. *Journal of Educational and Psychological Studies [Jeps]*, 6(3), 23. <https://doi.org/10.24200/jeps.vol6iss3pp23-30>
- Alhadi, S., & Saputra, W. N. E. (2017). *The Relationship Between Learning Motivation and Learning Outcome of Junior High School Students in Yogyakarta*. <https://doi.org/10.2991/yicemap-17.2017.23>
- Asante, G., Nkansah, G. B., & Agbee, D. (2022). (De)centralisation in Fee-Free Policymaking Process: Comparative Review of Progressive Free Senior High and Free Senior High School Policies in Ghana. *Policy Futures in Education*, 22(1), 66–89. <https://doi.org/10.1177/14782103221135919>
- Ayeni, A. J., & Amanekwe, A. P. (2018). Teachers' Instructional Workload Management and Students' Academic Performance in Public and Private Secondary Schools in Akoko North-East Local Government, Ondo State, Nigeria. *American International Journal of Education and Linguistics Research*, 1(1), 9–23. <https://doi.org/10.46545/aijelr.v1i1.24>
- Azagba, S., Kennedy, R. D., & Baskerville, B. (2015). Smoke-Free School Policy and Exposure to Secondhand Smoke: A Quasi-Experimental Analysis. *Nicotine & Tobacco Research*, 18(2), 170–176. <https://doi.org/10.1093/ntr/ntv077>
- Baghian, N., Shati, M., Sari, A. A., Eftekhari, A., Rasolnezhad, A., Nanaei, F., & Ahmadi, B. (2023). Barriers to Mental and Social Health Programs in Schools: A Qualitative Study. *Iranian Journal of Psychiatry*. <https://doi.org/10.18502/ijps.v18i2.12360>
- Baker, B. D., & Weber, M. (2016). State School Finance Inequities and the Limits of Pursuing Teacher Equity Through Departmental Regulation. *Education Policy Analysis Archives*, 24, 47. <https://doi.org/10.14507/epaa.24.2230>
- Baker, B. D., & Welner, K. G. (2010). Premature Celebrations: The Persistence of Inter-District Funding Disparities. *Education Policy Analysis Archives*, 18, 9. <https://doi.org/10.14507/epaa.v18n9.2010>
- Bartfeld, J., Berger, L. M., Men, F. K., & Chen, Y. (2019). Access to the School Breakfast Program Is Associated With Higher Attendance and Test Scores Among Elementary School Students. *Journal of Nutrition*, 149(2), 336–343. <https://doi.org/10.1093/jn/nxy267>
- Bhuwania, P., Huh, K., & Heymann, J. (2023). Impact of Tuition-Free Education Policy on Child Marriage and Early Childbearing: Does Secondary Matter More? *Population and Development*

*Review*, 49(1), 43–70. <https://doi.org/10.1111/padr.12538>

- Casely-Hayford, L. (2024). *The Intended and Unintended Effects of Secondary School Fee Abolition: Evidence From Ghana's Free Senior High School Policy*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/hsp7b>
- Chibali, W., & Mwami, J. (2022). Teachers' Attitude on Implementing the Free Basic Education in Kiteto District Council, Tanzania. *East African Journal of Education Studies*, 5(3), 29–41. <https://doi.org/10.37284/eajes.5.3.854>
- Cochrane, L. J., Olson, C. A., Murray, S., Dupuis, M., Tooman, T., & Hayes, S. M. (2007). Gaps Between Knowing and Doing: Understanding and Assessing the Barriers to Optimal Health Care. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 27(2), 94–102. <https://doi.org/10.1002/chp.106>
- Cohen, J. F., Hecht, A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). Universal School Meals and Associations With Student Participation, Attendance, Academic Performance, Diet Quality, Food Security, and Body Mass Index: A Systematic Review. *Nutrients*, 13(3), 911. <https://doi.org/10.3390/nu13030911>
- Diamond, J. B., & Spillane, J. P. (2004). High-Stakes Accountability in Urban Elementary Schools: Challenging or Reproducing Inequality? *Teachers College Record*, 106(6), 1145–1176. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2004.00375.x>
- Edwards III, G. C., Barrett, A., & Peake, J. (1997). The legislative impact of divided government. *American Journal of Political Science*, 545–563.
- Farida, N., & Maulana, A. (2022). Strategi Program Bus Sekolah Gratis Bagi Resiko Pelajar Dalam Berlalu Lintas di Kabupaten Jember (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember). *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(4).
- Feriansyah, A. (2024). Implementation of Tender Activities for Procurement of Government Goods and Services Electronically (E-Procurement). *International Journal of Research in Commerce and Management Studies*, 06(02), 32–45. <https://doi.org/10.38193/ijrcms.2024.6204>
- Gage, N. A., Kern, L., George, H. P., Elfner, K., & Robbie, K. (2022). Exploring SWPBIS Implementation Outcomes in Rural and Urban Schools in Florida. *Rural Special Education Quarterly*, 41(3), 129–139. <https://doi.org/10.1177/87568705221094560>
- Gibbs, K. (2022). Voices in Practice: Challenges to Implementing Differentiated Instruction by Teachers and School Leaders in an Australian Mainstream Secondary School. *The Australian Educational Researcher*, 50(4), 1217–1232. <https://doi.org/10.1007/s13384-022-00551-2>
- Giesecke, K., Goldberg, L. R., & Ding, X. (2011). A top-down approach to multiname credit. *Operations Research*, 59(2), 283–300.
- Godda, H. (2018). Free Secondary Education and the Changing Roles of the Heads of Public Schools in Tanzania: Are They Ready for New Responsibilities? *Open Journal of Social Sciences*, 06(05), 1–23. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.65001>

- Grindle, M. S., & Hilderbrand, M. E. (1995). Building sustainable capacity in the public sector: what can be done? *Public Administration and Development*, 15(5), 441–463.
- Hairan, H. (2024). Regulation of Education Implementation in Kutai Kartanegara Based on Education Policy. *Law and Safety*, 92(1), 133–141. <https://doi.org/10.32631/pb.2024.1.12>
- Hariyanto, D., Arafat, Y., & Wardiah, D. (2021). The Effect of Facilities and Motivation on Learning Outcomes of High School Students in Gelumbang, Indonesia. *Journal of Social Work and Science Education*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.52690/jswse.v2i1.210>
- Haryaningsih, S., Yohanes, Y., Sihaloho, N. T. P., & Andriani, F. D. (2022). The implementation of MSMEs Protection Policies during the Covid-19 Pandemic. *Khazanah Sosial*, 4(4), 731–744. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i4.19250>
- Hertzog, N. B. (2023). School District Equity Initiatives That Impact Access to Accelerated and Advanced Learning. *Gifted Child Quarterly*, 67(4), 325–336. <https://doi.org/10.1177/00169862231186669>
- Hyman, J. (2017). Does Money Matter in the Long Run? Effects of School Spending on Educational Attainment. *American Economic Journal Economic Policy*, 9(4), 256–280. <https://doi.org/10.1257/pol.20150249>
- Ibrahim, R. A. (2024). Analysis of the Availability and Gaps of Educational Facilities in Teluk Bintuni Regency Papua. *International Journal of Ethno-Sciences and Education Research*, 4(2), 43–48. <https://doi.org/10.46336/ijeer.v4i2.620>
- Imperial, M. T. (2021). Implementation structures: The use of top-down and bottom-up approaches to policy implementation. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Johnson, C., & Start, D. (2001). *Rights, claims and capture: Understanding the politics of pro-poor policy*. Overseas Development Institute London.
- Jones, C. O. (1979). American politics and the organization of energy decision making. *Annual Review of Energy*, 4(1), 99–119.
- Jones, C., & Palikara, O. (2023). How Do Parents and School Staff Conceptualize Parental Engagement? A Primary School Case Study. *Frontiers in Education*, 8. <https://doi.org/10.3389/educ.2023.990204>
- Kiwang, A. S., Pandie, D. B. W., & Gana, F. (2014). Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 31–36.
- Mangare, A. C. (2023). Implementation of School Culture-Based Character Education Strengthening Program at SMP Negeri 10 Satap Tondano. *Technium Social Sciences Journal*, 43, 241–251. <https://doi.org/10.47577/tssj.v43i1.8868>
- Matheny, K. T., Thompson, M. E., Townley-Flores, C., & Reardon, S. F. (2023). Uneven Progress: Recent Trends in Academic Performance Among U.S. School Districts. *American Educational Research Journal*, 60(3), 447–485. <https://doi.org/10.3102/00028312221134769>

- Mayer, S. E. (2002). How Economic Segregation Affects Children's Educational Attainment. *Social Forces*, 81(1), 153–176. <https://doi.org/10.1353/sof.2002.0053>
- Mazmanian, D. H. (n.d.). dan Paul A. Sabatier.(1983). *Implementation and Public Policy*. New York: HarperCollins.
- Meter, D. S. Van, & Van Horn, C. E. (1978). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Frame Administration & Society*. Sage Publication. Inc.
- Michelson, E. S. (2021). Science philanthropy, energy systems research, and societal responsibility: A match made for the 21st century. *Energy Research & Social Science*, 72(January), 101886. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101886>
- Moradi, T. (2023). Challenges of Budgeting and Public Financial Management in Iran's Health System: A Qualitative Study. *Medical Journal of the Islamic Republic of Iran*. <https://doi.org/10.47176/mjiri.37.80>
- Mr., F. D., Muneja, M. S., & Ilomo, O. (2020). Challenges on the Implementation of Free Education Policy in Tanzania: A Case of Public Primary Schools in Babati Town. *East African Journal of Education and Social Sciences*, 1(3), 32–38. <https://doi.org/10.46606/eajess2020v01i03.0040>
- Ndolo, M. A., & Simatwa, E. M. (2016). Impact of Free Secondary Education Policy on Primary to Secondary Education Transition Rate in Kenya: A Case Study of Mbita and Suba Sub- Counties. *Educational Research Journal*, 07(02). <https://doi.org/10.14303/er.2016.126>
- Ng, S. W. 吳., & Lee, T. (2015). How Parents Were Involved in a Special School in Hong Kong. *International Journal of Educational Management*, 29(4), 420–430. <https://doi.org/10.1108/ijem-07-2014-0095>
- Ningsih, T. K., & Santosa, B. (2020). Dual Education System in SMK Muhammadiyah Wanareja. *Journal of Vocational Education Studies*, 2(2), 127. <https://doi.org/10.12928/joves.v2i2.1206>
- Ogawa, M. (2021). The Role of Low-Cost Private Secondary Schools in Rural Kenya Under the 'Free Secondary Education Policy.' *Journal of International Comparative Education*, 10(2), 97–115. <https://doi.org/10.14425/jice.2021.10.2.1205>
- Owens, A. M. D. (2017). Income Segregation Between School Districts and Inequality in Students' Achievement. *Sociology of Education*, 91(1), 1–27. <https://doi.org/10.1177/0038040717741180>
- Pangestu, R. P. A. G. (2023). *Evaluasi Implementasi Program Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) di Kabupaten Ponorogo*. UNS (Sebelas Maret University).
- Puspitoningrum, I. D. (2009). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri I Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009*. UNS (Sebelas Maret University).
- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan? *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 102–116.
- Rahman, M., Shojaei, A., Karim, J., Pangkas, J., Hun, T. J., & Suhaili, M. R. B. (2015). Teachers Perception on Tobacco Free School in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Medical Science*, 14(3),

274–279. <https://doi.org/10.3329/bjms.v14i3.18470>

- Ramadhani, A. K., & Hidayati, A. (2024). The Effect of Organizational Commitment on the Effectiveness of School Operational Assistance Funds in Elementary Schools in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 13(2), 411–419.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Rangkuti, S., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok. *Natapraja*, 7(2), 231–244. <https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.24757>
- Redding, C., & Grissom, J. A. (2021). Do Students in Gifted Programs Perform Better? Linking Gifted Program Participation to Achievement and Nonachievement Outcomes. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 43(3), 520–544. <https://doi.org/10.3102/01623737211008919>
- Rulyansah, A., Mardhotillah, R. R., Budiarti, R. P. N., Authar, N., & Firdhausyah, Y. A. (2023). Pembelajaran Berpikir Komputasional serta Lomba Gratis bagi Siswa dan Guru SDN II Bantaran Kabupaten Probolinggo. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 153–160.
- Sabani, F., & Lutfia, I. L. (2023). Penguatan Pendidikan di Masyarakat Melalui Vitalisasi Pendidikan Non Formal di Kota Palopo. *Jurnal Sinestesia*, 13(1), 267–276.
- Schmidt, W. H., Burroughs, N., Zoido, P., & Houang, R. T. (2015). The Role of Schooling in Perpetuating Educational Inequality. *Educational Researcher*, 44(7), 371–386. <https://doi.org/10.3102/0013189x15603982>
- Shareefa, M., Moosa, V., Zin, R. M., Abdullah, N. Z. M., & Jawawi, R. (2019). Teachers' Perceptions on Differentiated Instruction: Do Experience, Qualification and Challenges Matter? *International Journal of Learning Teaching and Educational Research*, 18(8), 214–226. <https://doi.org/10.26803/ijlter.18.8.13>
- Smale-Jacobse, A., Meijer, A., Helms-Lorenz, M., & Maulana, R. (2019). Differentiated Instruction in Secondary Education: A Systematic Review of Research Evidence. *Frontiers in Psychology*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02366>
- Sobandi, A., Yuniarsih, T., Rasto, & Adman. (2020). Learning Facilities: Can It Improve the Vocational School Productivity? *Journal of Educational and Social Research*, 10(4), 146. <https://doi.org/10.36941/jesr-2020-0074>
- Soenarto, S., Amin, M. M., & Kumaidi, K. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan Sekolah Menengah Kejuruan program 4 tahun dalam meningkatkan employability lulusan. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 21(2), 215–227.
- Stanley, J. M., & Wyness, M. (1999). Living With Parental Involvement: A Case Study of Two “Open Schools.” *International Studies in Sociology of Education*, 9(3), 239–266. <https://doi.org/10.1080/09620219990200047>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan*

*Konstruktif* (M. S. Sofia Yustiani Suryandri, SE (ed.); III). ALFABETA.

- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. In *Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*.
- Sukma, N. I., & Jayadi, A. (2023). Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 312–316.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. In *Universitas Diponegoro*.
- Tawiah, D., & Addai-Mensah, P. (2023). The Effectiveness of the Free Senior High School Policy in Ghana: A Moral Development Perspective. *E-Journal of Humanities Arts and Social Sciences*, 487–500. <https://doi.org/10.38159/ehass.20234419>
- Terry, A., & Zhang, N. J. (2016). The Impact of Tobacco-Free School Policies on Youth Smoking Rates in Florida Public School Districts. *Journal of School Health*, 86(2), 129–134. <https://doi.org/10.1111/josh.12360>
- Thankachan, B., & Moore, D. R. (2017). Challenges of Implementing Free and Open Source Software (FOSS): Evidence From the Indian Educational Setting. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 18(6). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i6.2781>
- Tumundo, E. C., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Minahasa Utara. *GOVERNANCE*, 3(1).
- Utami, W. B., Wedi, A., & Aulia, F. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan*, 6(3), 285–294.
- Wang, Y., Liu, Y., Xing, L., & Zhang, Z. (2021). An Improved Accessibility-Based Model to Evaluate Educational Equity: A Case Study in the City of Wuhan. *Isprs International Journal of Geo-Information*, 10(7), 458. <https://doi.org/10.3390/ijgi10070458>
- Warman, W., Poernomo, S. A., Januar, S., & Amon, L. (2021). Leadership Style and Principal Supervision in Improving Teacher Performance at State High Schools in Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province, Indonesia. *Eduline Journal of Education and Learning Innovation*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.35877/454ri.eduline581>
- Williams, B. (2023). The 2010–15 Coalition Government and the Legacy of Free Schools in England. *Policy Futures in Education*, 22(5), 793–809. <https://doi.org/10.1177/14782103231176360>
- Zhang, X., Guo, J., Li, M., Xu, R., Wang, J., Yang, Y., & Shen, H. (2023). Teacher Stress Among Public Primary and Secondary Schoolteachers in Datong, a City of Shanxi Province, China: Association Between Teacher Stress and Standardized Workload. *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, 36(2), 161–176. <https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01948>